

# KESEHATAN HEWAN – DAN – PETERNAKAN – PENYELENGGARAAN

2022

PERDAKAB. PURWOREJO NO. 3 TAHUN 2022, LD 2022/NO.3 SETDA KAB. PURWOREJO 64 HLM

## PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

- Abstrak : – Penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan dilaksanakan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dalam hal pemenuhan kebutuhan pangan yang aman, sehat, utuh dan halal, serta terselenggaranya peternakan yang maju, berdaya saing, dan berkelanjutan, untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan di daerah, diperlukan pengaturan tentang penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan;
- Dasar Hukum Perda Kab. Purworejo ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;
  - Dalam Peraturan Daerah ini menetapkan Tentang Penyelenggaraan Peternakan Dan Kesehatan Hewan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya, diatur tentang Pengertian, Perencanaan, Kawasan, Peternakan, Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner Dan Kesejahteraan Hewan, Otoritas Veteriner, Pemberdayaan Peternak Dan Usaha Di Bidang Peternakan Dan Kesehatan Hewan, Penelitian Dan Pengembangan, Pendanaan, Peran Serta Masyarakat, Ketentuan Penyidikan, Ketentuan Pidana.
- Catatan : – Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yakni 31 Mei 2022;
- Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan
  - Sanksi pidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh

juta rupiah) dan masuk ke Kas Negara sebagai Penerimaan Negara.

- Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah sesuai peraturan perundang-undangan
- Penjelasan 12 Hlm